

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam Penjabaran terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian, terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan latar belakang untuk menjadi acuan serta landasan dalam melakukan Analisa lebih lanjut sehingga dapat memperoleh hasil penelitian hingga penarikan kesimpulan. Pada bab kajian Pustaka akan menampilkan pembahasan dari penelitian terdahulu beserta dengan penggunaan metode dan teori yang sama seperti jurnal penelitian serta buku tentang Peranan Pemdes Pada Penanganan Kasus Stunting Desa Ampeldento.

2.1 Penelitian Terdahulu

Riset ini mengkaji riset sebelumnya yang dijadikan tolak ukur penyelesaiannya. Penelitian terdahulu dapat mempermudah peneliti dalam menentukan sistematis untuk penyusunan dari segi tema dan konsep. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan tema berkaitan dan relevan.

Pertama, riset sebelumnya oleh Lestari et al. (2022) di Desa Kencana, Kecamatan Balai Jaya, menunjukkan peranan Pemdes dalam pencegahan stunting telah berjalan baik. Alokasi dana maupun tindakan dan juga gagasan dari Pemdes telah berhasil membuat desa tersebut terjauhkan terhadap persoalan stunting. Berbagai aktivitas Pemdes yang dilaksanakan mencakup kegiatan sweeping balita, pemberian makanan tambahan untuk balita maupun ibu hamil serta imunisasi anak.

Kedua, riset yang dilaksanakan Saputri (2019) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting, perlu dilakukan pendataan secara terpadu (data balita stunting sesuai nama maupun alamatnya). Saat ini, pendataan belum terintegrasi dengan baik sehingga balita stunting sulit diidentifikasi dengan jelas. Selain itu, perlu pemantauan yang lebih aktif terhadap program yang telah dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan. Misalnya,

pemantauan terhadap penerimaan makanan tambahan oleh balita dan keluarga miskin. Penting juga untuk mengoptimalkan alokasi anggaran yang sudah ada agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih signifikan.

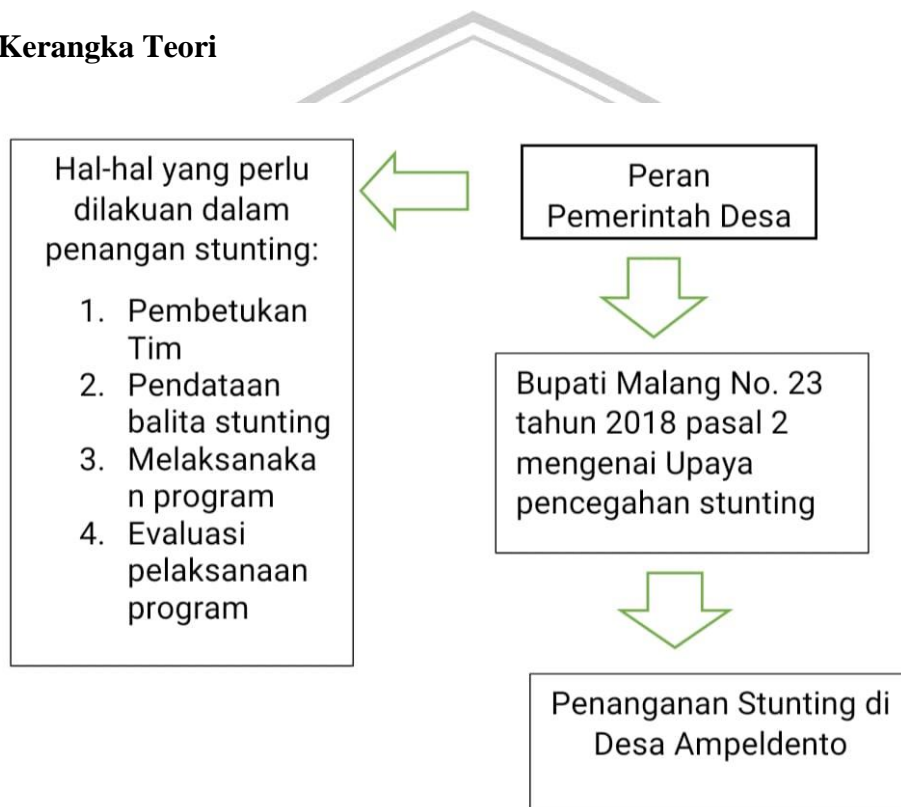
Ketiga, riset Aura Regita et al. (2023) mengenai peran Pemdes Wedoro untuk mencegah serta menurunkan stunting menunjukkan desa tersebut telah melaksanakan intervensi gizi dengan terintegrasi. Ini termasuk menyediakan program pos gizi dan sosialisasi yang dinamakan program Kelas Ibu Hamil. Meskipun demikian, dalam hal pengobatan infeksi atau penyakit, kader kesehatan hanya memberi imunisasi dengan rukun serta merekomendasikan pada tenaga kesehatan yang lebih profesional jika diperlukan untuk kasus infeksi ataupun penyakit serius, karena keterbatasan fasilitas kesehatan.

Keempat, riset yang dijalankan Umam et al. (n.d.) tentang sosialisasi bahaya stunting di Desa Pucung Wetan, Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo, menunjukkan tingkat stunting yang tinggi di desa tersebut. Penyebabnya antara lain kekurangan protein hewani pada anak, pernikahan dini yang tinggi, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya stunting. Pemerintah desa aktif berupaya mengatasi masalah ini dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan vitamin A secara rutin. Mahasiswa KPM Unsiq juga turut berperan dalam mendukung upaya pemerintah desa dengan memberikan PMT dan mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi. Harapannya, dengan langkah-langkah ini, kasus stunting di Desa Pucung Wetan dapat diatasi, sehingga anak-anak dapat tumbuh secara normal, sehat, dan cerdas.

Kelima, Rahmadani & Lubis (2023) melaksanakan riset yang mengevaluasi peranan dari Pemdes dalam penentuan angka stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 di Kecamatan Lubuk Pakam. Hasilnya menunjukkan kinerja kecamatan tersebut berhasil menangani stunting dengan mengalami penurunan signifikan, dari 12,5% pada 2021 menjadi 13,9% pada 2022. Progres-progres yang dijalankan oleh PPKS kecamatan yang ditujukan kepada masyarakat membawa dampak positif dalam mencapai target kesuksesan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya kecamatan dalam membangun sarana kesehatan dan menyelenggarakan penyuluhan stunting secara rutin, yang merupakan langkah positif yang diambil pemerintah dalam menanggapi masalah stunting. Hasilnya juga menunjukkan kesuksesan dalam dua titik intervensi holistik, yaitu penyuluhan rutin mengenai stunting maupun pembangunan fasilitas serta prasarana kesehatannya.

2.2 Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

2.3 Landasan Teori

2.2.1 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Desa di

bawah kepemimpinan Kepala Desa memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal. Ini berarti Kepala Desa memiliki kewenangan untuk membuat aturan sendiri yang mencakup pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat, seperti Peraturan Desa atau keputusan desa. Selain itu, Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permanasari et al., 2020).

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Kata implementasi dari Bahasa Inggris yakni *to implement* diartikan dengan menerapkan. Implementasi diartikan juga menerapkan sebuah konsep ataupun kebijakan. Ini melibatkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terlebih dahulu agar tidak merugikan masyarakat. Dalam penelitian implementasi kebijakan, Edward III mengidentifikasi empat faktor penting.

1. Komunikasi

Implementasi yang sukses terjadi saat para pengambil keputusan memiliki pemahaman yang baik tentang peran mereka. Hal ini dapat tercapai melalui komunikasi yang efektif. Komunikasi menjadi kunci agar pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan dapat tetap konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan pada masyarakatnya.

2. Disposisi

Untuk mencapai efektivitas, pelaksana kebijakan wajib mempunyai tidak hanya pengetahuan mengenai hal yang dilaksanakan, tetapi juga *skill* melaksanakannya. Hal ini penting untuk menghindari bias dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dalam praktiknya.

3. Sumber Daya

Konsistensi dan keakuratan dalam mengatur serta menyampaikan aturan-aturan sangatlah penting. Jika para pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya secara memadai dalam menjalankan tugas dengan efektif, implementasi kebijakan tersebut akan kurang berhasil.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan secara kompleks memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Ketika struktur birokrasi tidak mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik, hal ini bisa membuat sumber daya menjadi tidak efektif serta menjadi penghambat jalannya kebijakan.

2.2.3 Pengaruh Kebudayaan pada Perilaku Masyarakat

Mengacu KBBI, budaya mencakup pikiran, hasil karya serta akal budi. Membudayakan berarti mengajarkan dan mendidik agar individu memiliki budaya, serta membiasakan perilaku baik untuk membentuk budaya tersebut. Menurut E.B Tylor, budaya mencakup pengetahuan, kepercayaan, ilmu pengetahuan, moralitas, seni, adat istiadat, maupun keterampilan yang dimiliki manusia sebagai bagian dari masyarakat. Unsur-unsur budaya termasuk sistem kekerabatan maupun organisasi sosial, membantu antropologi memahami individu membentuk masyarakat dengan adanya kelompok sosial. Koentjaraningrat menyatakan kehidupan tiap kelompok individu diatur dengan adat istiadat serta regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka..

Hofstede (1991) menjelaskan lapisan budaya dengan mengkategorikannya ke beberapa tingkatan yakni:

- a. Daerah (regional) ataupun suku (ethnic), Bahasa serta agama (religion).
- b. Nasional (national level), di tingkat negara.
- c. Generasi
- d. Perbedaan jenis kelaminnya (gender)

- e. Perusahaan maupun instansi.
- f. Social dikaitkan pada pekerjaan, pendidikan maupun profesi

Budaya sering kali mengalami ketidakharmonisan pada berbagai tingkatan, seperti konflik gender dalam budaya organisasi dan konflik antargenerasi dalam budaya daerahnya. Mengacu pada analisis faktor, Hofstede (1980) dari segi empiris menjelaskan empat dimensinya yakni :

- a. Perbedaan kekuasaan dalam budaya mencerminkan ketidaksejajaran bagi individu dalam institusi atau organisasi, tergantung pada faktor sosial, pendidikan, dan jabatan. Norma-norma terkait dengan perbedaan kekuasaan berkaitan dengan tingkat ketidaksejajaran yang diinginkan dalam masyarakat, dan ini tercermin dalam nilai-nilai tentang kekuasaan. French dan Raven mengidentifikasi lima jenis kekuatan sosial yang berdampak pada politik, agama, dan organisasi. Hofstede menggunakan ukuran seperti populasi, luas geografis, serta tingkat kesejahteraan untuk mengevaluasi perbedaan kekuasaan, di mana tingkat kesejahteraan tinggi ditandai dengan faktor seperti urbanisasi yang tinggi dan sistem pendidikan yang berkualitas.
- b. Pengelakan pada ketidakpastian adalah dimensi budaya yang menjelaskan bagaimana warga mengatasi lingkungan yang tergolong kurang terstruktur, maupun sulit diprediksi. Masyarakat memakai teknologi, agama serta hukum untuk mengatasi ketidakpastian ini. Teknologi membantu dalam menghadapi ketidakpastian yang dikarenakan oleh alam, dalam hal ini hukum membantu menghadapi ketidakpastian terkait perilaku individu lainnya, sementara agama membantu guna menerima ketidakpastiannya yang tidak bisa diatasi. Ketidakpastian pada organisasinya terkait dengan konsep lingkungan biasanya di luar kendali perusahaan. Teori-teori yang sering digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam organisasi meliputi teori pengambilan keputusan pada keadaan tak pasti, teori kontingensi,

dan teori perilaku strategis. Pengelakan ketidakpastian pada instansinya dilakukan melalui teknologi, regulasi, maupun prosedur. Teknologi digunakan untuk meramalkan hasil jangka pendek, sedangkan peraturan dan prosedur digunakan untuk mengurangi ketidakpastian yang muncul akibat perilaku anggotanya. Beberapa indikator dalam pengukuran pengelakan ketidakpastian meliputi tingkat stres, stabilitas pekerja maupun orientasi aturan.

- c. Individualisme versus kolektivisme adalah dimensi budaya yang menunjukkan apakah individu lebih memprioritaskan kepentingan pribadi maupun keluarga ataupun kepentingan bersamanya pada sebuah kelompok. Dimensi tersebut muncul baik pada masyarakat maupun organisasi. Pada level organisasi, tingkat individualisme ataupun kolektivisme masyarakatnya dapat mempengaruhi tingkat ketergantungan emosional antarindividu. Beragam faktor yang mempengaruhi individualisme termasuk pendidikan, ukuran organisasi, sejarah organisasi, teknologi yang dipakai, maupun subkultur organisasinya (Hofstede: 1980 217).
- d. Maskulinitas versus feminitas adalah dimensi budaya yang mencerminkan peran yang beragam di dalam masyarakat tergantung pada jenis kelamin anggota. Di warga maskulin, pria diharapkan lebih ambisius, suka berkompetisi, maupun berani mengemukakan pendapat, dengan fokus pada pencapaian kesuksesan material. Di sisi lain, di masyarakat feminin, perhatian lebih diberikan pada kualitas kehidupan daripada pencapaian materi. Konsep ini tidak berkaitan langsung dengan jenis kelamin, melainkan dengan atribut maskulin dan feminin dalam masyarakat.